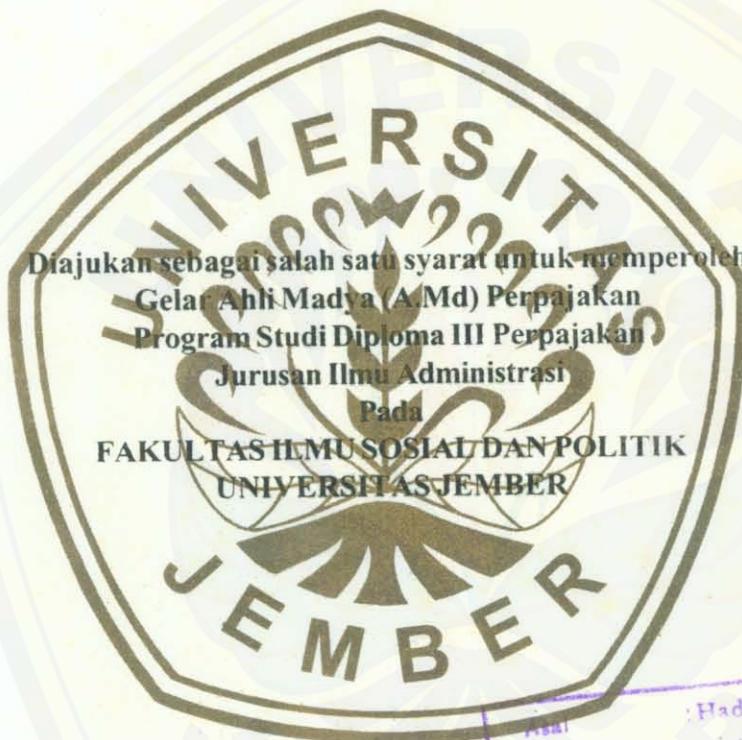


**PELAKSANAAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21  
MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000  
ATAS PEGAWAI TETAP DI PT. PLN (PERSERO)  
DISTRIBUSI JAWA TIMUR CABANG SITUBONDO**

**LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA**



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan  
Program Studi Diploma III Perpajakan  
Jurusan Ilmu Administrasi  
Pada  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER

Oleh :

*Evi Yoritasanti*

NIM. 980903101026

Dosen Pembimbing :

**Drs. TOTOK SUPRIYANTO**

NIP. 130 605 111

Asal

: Hadiah  
Pembelian

Terima Tel:

5/6/01

No. Buk:

10225 894

Klas

226 24

Yon  
P.

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
2001**

**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI**  
**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**

**PERSETUJUAN**

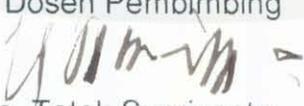
Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Nama : EVI YORITASANTI  
NIM : 980903101026  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program studi : Diploma III Perpajakan  
Judul : Pelaksanaan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 Atas Pegawai Tetap di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo.

Jember, 14 Mei 2001

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

  
Drs. Totok Supriyanto

NIP. 130 605 111

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**

**PENGESAHAN**

Telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember :

Nama : EVI YORITASANTI  
NIM : 980903101026  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Diploma III Perpajakan

**PELAKSANAAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000  
ATAS PEGAWAI TETAP DI PT. PLN (PERSERO)  
DISTRIBUSI JAWA TIMUR CABANG SITUBONDO**

Hari : Selasa  
Tanggal : 08 Mei 2001  
Jam : 15.00 - Selesai  
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember  
Dan telah dinyatakan lulus.  
Panitia Penguji

Anggota

Drs. Abd. Kholiq Ashari, Msi  
NIP. 131 832 305

Ketua

Drs. Totok Supriyanto  
NIP. 130 605 111

Mengetahui,  
Universitas Jember  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Dekan



Drs. H. Moch. Toerki  
NIP. 130 524 832

## PERSEMBAHAN

1 Bapak dan Ibu Abbas Tercinta

“Sebagai Wujud bakti Nanda dan rasa hormat atas segala kasih sayang, dukungan, serta do'a yang tiada pernah henti.....”

2 Mbak Nya, Dik Nina, Dik ike, Adik Cimex dan Om Cipul

“Makasih banyak untuk motivasinya”

3 Tante Ana, De Cu dan Mbah Kacung

“Terima kasih atas bantuan dan dukungannya”

4 Ervan Catur Hidayat

“Thank's atas semuanya.....”

5 Almamater yang kubanggakan.

## Kata Pengantar

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program akhir studi pada Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Laporan ini merupakan hasil kegiatan selama mengadakan Praktek Kerja Nyata yang berorientasi pada Pajak Penghasilan Pasal 21 dan penyusunannya berdasarkan dari apa yang telah kami amati serta mendapat bimbingan dari Kepala Seksi Kepegawaian PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo. Selain itu, juga didukung dengan buku-buku pedoman yang ada di PLN. Sedangkan untuk teori-teori yang digunakan berdasarkan dari buku-buku yang kami peroleh dari perkuliahan yang sesuai dengan judul laporan ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian penulisan laporan ini banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak baik moral maupun material. Pada kesempatan ini penulis sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang tulus terutama kepada:

1. Bapak Drs. H. Moch. Toerki, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bapak Drs. Agus Budihardjo, MA, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi.
3. Bapak Drs. Sasongko, MSi, selaku Ketua Program Studi DIII Perpajakan.
4. Bapak Drs. Totok Supriyanto, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan motivasi, bimbingan, saran-saran serta arahan yang sangat bermanfaat bagi penulis hingga terselesaikannya laporan ini.
5. Bapak Drs.H. Fadholi Sa'id, SU, selaku dosen wali.

6. Bapak Ir. Rusbandi, selaku Kepala Cabang PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo yang telah memberikan tempat dan waktu kepada penulis untuk mengadakan Praktek Kerja nyata.
7. Bapak Djati Walujo, B.Ac, selaku Kepala Bagian Administrasi pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo.
8. Bapak Faissal, selaku Kepala Seksi Kepegawaian pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo yang telah membimbing penulis selama mengadakan Praktek Kerja Nyata.
9. Seluruh staf dan karyawan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo, khususnya bu Win, pak Ambardi, pak Koeswoto, pak Koeslan, pak Sobir, Pak Bambang Sudarwoko, mbak Ita dan pak Agus.
10. Sahabat-sahabatku Wiwid, Evi dan Putri, thank's untuk persaudaraanya.
11. Anak-anak DIII Perpajakan Genap '98, I Don't Forget You Forever.
12. Anak-anak Jawa VI Nomor 76, terima kasih untuk kebersamaannya.
13. Teman-temanku Yeti, Antik, Dio, David, Agus, Imam, Anie, Nur, Dyah, Mia, Jus, Wawang, lan dan teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya dalam penulisan Laporan ini masih jauh dari sempurna, banyak kekurangannya mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharap adanya kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan laporan ini.

Jember, Mei 2001

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Persembahan.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar isi.....	vii
Daftar Tabel.....	viii
Daftar Lampiran.....	ix
Daftar Gambar.....	x
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan.....	3
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata.....	3
2.2.1 Kegunaan Praktek Kerja Nyata.....	3
<b>BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....</b>	<b>5</b>
2.1 Sejarah singkat PT. PLN (Persero).....	5
2.1.1 Visi dan Misi PT. PLN (Persero) Distribusi.....	9
2.2 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas.....	10
2.2.1 Struktur organisasi.....	10
2.2.2 Uraian tugas.....	12
2.3 Jumlah Pegawai.....	19
<b>BAB III : PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA.....</b>	<b>21</b>
3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	21
3.1.1 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.....	22
3.2 Penilaian Kegiatan Perusahaan dalam Perpajakan.....	41
<b>BAB IV : PENUTUP.....</b>	<b>43</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>44</b>

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Komposisi Jumlah Pegawai di PT PLN. (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo.....	19
Tabel 2	: lokasi Kegiatan Praktek Kerja Nyata di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo.....	21
Tabel 3	: Laporan Aktivitas Karyawan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo.....	30
Tabel 4	: Laporan Koefisien Kinerja Pegawai PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo.....	33
Tabel 5	: Daftar Pembayaran Gaji PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo.....	39
Tabel 6	: Daftar Pembayaran Tunjangan Kompensasi Karya PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo.....	39

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Kegiatan Magang.....	45
Lampiran 2 : Tarif Tunjangan Listrik.....	48
Lampiran 3 : Tarif Tunjangan Transport.....	49
Lampiran 4 : Tarif Tunjangan Perumahan.....	50
Lampiran 5 : Tarif Tunjangan Kompensasi Karya.....	51
Lampiran 6 : Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 dan 26.....	52
Lampiran 7 : Surat Setoran Pajak.....	54
Lampiran 8 : Perhitungan PPh Pasal 21.....	55
Lampiran 9 : Data Identitas Wajib Pajak.....	56
Lampiran 10: Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Pasal 21.....	57
Lampiran 11: Daftar Setoran PPh Pasal 21 tahun takwim 1999.....	58
Lampiran 12: Daftar Verifikasi.....	59
Lampiran 13: Surat Keterangan selesai PKN.....	60
Lampiran 14: Surat tugas.....	61
Lampiran 15: Daftar Konsultasi.....	62
Lampiran 16: Daftar hadir kegiatan PKN.....	63

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 : Struktur organisasi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo..... 11



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan Bangsa Indonesia harus berjalan terus. Saat ini pemerintah berusaha meningkatkan pembangunan disegala bidang baik yang menyangkut pembangunan immaterial dan material. Satu hal yang sangat mendasar dan tidak dapat dipisahkan dari pembangunan adalah permasalahan dana yang dibutuhkan untuk pembiayaan pembangunan.

Dengan adanya pembiayaan pembangunan yang meningkat dari tahun ke tahun dan terdepresinya nilai tukar rupiah sampai saat ini serta keadaan politik yang terguncang akhir-akhir ini sehingga mendorong timbulnya persaingan yang ketat pada berbagai usaha yang ada di Indonesia. PT. PLN (Persero) adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menguasai cabang produksi terpenting yang dikuasai oleh negara, menguasai hajat hidup orang banyak dan bergerak dalam memenuhi kebutuhan listrik.

Dari beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ada di Situbondo, penulis memilih PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo untuk tempat magang karena tempatnya yang strategis dan persyaratan yang diajukan tidak terlalu sulit sehingga penulis dengan mudah dan cepat melaksanakan kegiatan magang di kantor PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo.

Sesuai dengan fungsinya, PLN (Persero) merupakan alat negara untuk melaksanakan dan melancarkan pembangunan, memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai alat untuk menambah pendapatan negara baik pusat maupun daerah. Disisi lain PLN sebagai badan usaha, lembaga ini dikenai sebagai Wajib Pajak oleh negara. Sehubungan dengan itu sesuai dengan tugas kurikuler, pada Praktek Kerja

Nyata ini penulis akan mengungkapkan kegiatan-kegiatan perusahaan terutama dalam kegiatan perpajakan khususnya mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 serta wawasan PT. PLN (Persero) Distribusi.

Pada dasarnya setiap badan usaha yang didirikan mempunyai tujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan guna kelangsungan hidup perusahaan. Hal ini tidak terkecuali pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo yang salah satu sumber pendapatan yang diperoleh adalah pembayaran rekening listrik yang merupakan sumber dana terbesar dari pada sumber-sumber dana yang lain.

Salah satu kegiatan PT. PLN (Persero) adalah melancarkan distribusi listrik pada masyarakat yang berlangganan dan mencatat tiap-tiap pembayaran atau penagihan rekening listrik. Pelaksanaan administrasi pencatatan penagihan rekening listrik ini sangat berguna dalam membantu melancarkan tugas manajemen dalam suatu perusahaan.

Kegiatan Perpajakan yang terjadi pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo tentunya terdiri dari bermacam pajak misal pajak penjualan listrik kepada konsumen atau pelanggan, Pajak Pertambahan Nilai, dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 terhadap setiap pegawai tetap dan pensiunan serta Pajak penghasilan pasal 21 yang bersifat final yang dibayarkan kepada tenaga ahli yang dimiliki oleh PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo. Semua kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan ditangani oleh ahlinya dalam bidang masing-masing. Dengan adanya sumbangan pajak dari PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo tentunya akan dapat menambah penerimaan negara yang berakibat lancarnya pembangunan disegala bidang sehingga dapat tercapainya tujuan nasional Bangsa Indonesia.

Wawasan PT. PLN (Persero) Distribusi adalah senantiasa berupaya meningkatkan mutu pelayanan kepada pelanggan agar nantinya menjadi puas serta tumbuh dan berkembang sesuai dengan bisnis yang sehat.

Tentunya PLN tidak melupakan kewajibanya untuk melaksanakan, menghitung dan menyerahkan penghasilan yang diterima oleh setiap pegawai tetapnya yang melebihi penghasilan Tidak Kena Pajak untuk dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Bagaimana kenyataan tersebut menarik untuk diungkapkan dalam laporan ini.

## **1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata**

### **1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata**

Dalam menyusun Praktek Kerja Nyata ini, penulis mempunyai tujuan-tujuan tertentu antara lain:

- 1) Ingin mengetahui dan mendiskripsikan tentang pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo.
- 2) Ingin mengetahui dan memahami secara langsung pemberian tunjangan-tunjangan yang ada di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo, serta cara penghitungan gaji dan pajak yang terutang oleh setiap pegawai tetap.
- 3) Ingin mengembangkan pengetahuan yang telah dipelajari dengan melihat pelaksanaan dilapangan melalui kegiatan magang selama satu bulan.
- 4) Ingin memperoleh gambaran tentang seberapa besar sumbangan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diberikan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo untuk menambah penerimaan negara.

### **1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata**

Penulisan laporan ini mempunyai kegunaan antara lain:

- 1) Untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

- 2) Bagi penulis, penulisan laporan ini jelas menambah pengalaman dalam menerapkan teori dibidang perpajakan yang diperoleh dibangku kuliah sekaligus membandingkan dengan kenyataan Praktek Kerja Nyata di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur cabang Situbondo khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai tetap.
- 3) Untuk meningkatkan pengetahuan dan memperluas wawasan dalam bidang Perpajakan khususnya penghitungan Pajak penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap.
- 4) Menambah referensi di perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember khususnya Diploma III Perpajakan.
- 5) Bagi instansi, hasil penulisan laporan ini diharapkan dapat dijadikan masukan dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Apabila suatu badan memiliki pegawai dan penghasilan pegawainya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak maka harus mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak setempat untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Nomor Pokok Wajib Pajak tersebut adalah suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak 1-001-629-3-627 yang terdaftar pada kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi, karena daerah Situbondo bagian dari wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi. PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo merupakan Wajib Pajak Badan, karena perusahaan menanggung pajak yang terutang setiap pegawainya dan dapat dibuktikan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 (a) dan (b).

#### 2.1 Sejarah Singkat PT. PLN (Persero)

Tenaga listrik yang mulai tersedia untuk masyarakat Indonesia sejak masa penjajahan Belanda diakhir abad XIX, tepatnya tahun 1894 sebelum pecah Perang Dunia II tahun 1942. Perkembangan pengelolaan tenaga listrik di Indonesia dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda bersama-sama dengan badan atau perusahaan yang menyediakan tenaga listrik, baik milik pemerintah daerah otonom (Gemeente), maupun swasta seperti: ANIEM

(Algemeene Netherlands Indische Electricitien Maatschapy), GEBO (Gas Electricitien Maatschapy Bandung en Omgeving), OGEM (Overzeesche Gas Electricitien Maatschapy).

Pada tahun 1927 pemerintah Belanda membentuk S'Lands Waterkracht Bedrijven (LWB) yaitu Perusahaan Listrik Negara yang mengelola PLTA Plegan, PLTA Lamajan, PLTA Bengkok Dago, PLTA Ubrug dan Kracak di Jawa Barat, PLTA Giringan di Madiun, PLTA Tes di Bengkulu, PLTA Tonsea lama di Sulawesi Utara dan PLTU di Jakarta. Selain itu di beberapa Kotapraja dibentuk perusahaan listrik Kotapraja.

Setelah menyerahnya Pemerintah Belanda kepada Jepang dalam Perang Dunia II maka Indonesia dikuasai oleh Jepang. Selama masa pendudukan Jepang mulai permulaan tahun 1942, perusahaan yang ada di Jawa dijadikan perusahaan listrik Jepang, dan oleh Angkatan Darat Jepang diberi nama:

- 1) Jawa Denki Jisyo Sha di Jakarta
- 2) Chobu Jawa Denki Sha di daerah Jawa Tengah
- 3) Seibu Jawa Denki Sha di daerah Jawa Barat
- 4) Tobu Jawa Sha di daerah Jawa Timur.

Dengan jatuhnya Jepang ke tangan Sekutu dan diproklamasikannya kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, beberapa karyawan yang berasal dari perusahaan-perusahaan listrik dan gas dari daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jakarta dipelopori unsur pemuda mengadakan pertemuan di Jakarta dengan maksud membicarakan langkah-langkah lanjut setelah proklamasi kemerdekaan. Setelah pertemuan selesai dan mencapai kesepakatan, pemuda karyawan listrik dan gas kembali kedaerahnya dan bersama-sama dengan seluruh karyawan yang ada di masing-masing Perusahaan Listrik dan Gas mengadakan aksi merebut dan mengambil alih secara serentak

perusahaan-perusahaan listrik dan gas yang dikuasai Jepang untuk diserahkan dan menjadi milik Pemerintah Republik Indonesia.

Setelah mengambil alih perusahaan listrik dan gas dari tangan kekuasaan Jepang pada bulan September 1945, suatu delegasi karyawan listrik dan gas menghadap pimpinan KNI Pusat yang pada waktu itu diketuai oleh Mr. Kasman Singodimejo untuk melaporkan tentang pengambil alihan Perusahaan Listrik dan Gas tersebut. Selanjutnya delegasi karyawan bersama pimpinan KNI Pusat menghadap Presiden Republik Indonesia yang pada waktu itu dijabat oleh Ir. Soekarno untuk melaporkan tentang pengambil alihan perusahaan listrik dan gas dari tangan kekuasaan Jepang dan menyerahkannya kepada pemerintah Republik Indonesia. Presiden Republik Indonesia menyambut dan menerima penyerahan itu. Kemudian perusahaan-perusahaan listrik dan gas yang ada saat itu disebut Jawatan Listrik dan Gas. Dengan penetapan pemerintah Nomor 1/SD tertanggal 27 Oktober 1945, Jawatan Listrik dan Gas dimasukkan dalam Departemen Pekerjaan Umum. Mulai saat itu penyediaan tenaga listrik nasional seluruh Indonesia berada ditangan Pemerintah Republik Indonesia.

Dengan adanya agresi Belanda I dan II sebagian besar perusahaan-perusahaan listrik dikuasai kembali oleh pemerintah Belanda atau pemiliknya semula. Pegawai-pegawai yang tidak mau bekerjasama kemudian, menguasai dan menggabungkan diri pada kantor-kantor Jawatan Listrik dan Gas Swasta. Kemudian Departemen Republik Indonesia mengeluarkan peraturan Pemerintah Nomor 163 tertanggal 3 Oktober 1953 tentang nasionalisasi perusahaan listrik milik bangsa asing di Indonesia jika waktu konsensinya habis.

Sejalan dengan meningkatnya perjuangan Bangsa Indonesia untuk membebaskan Irian Jaya dari cengkraman penjajahan Belanda maka dikeluarkan Undang-undang Nomor 86 tahun 1958 tertanggal 27 Desember 1958 tentang nasionalisasi semua perusahaan Belanda dan Peraturan

Pemerintah Nomor 18 tahun 1958 tentang nasionalisasi perusahaan listrik dan gas milik Belanda maka dibentuk pengurus perusahaan-perusahaan listrik dan gas (P3LG). Dengan Undang-undang tersebut seluruh perusahaan listrik Belanda berada ditangan Bangsa Indonesia. Pada tahun 1959 perusahaan-perusahaan listrik negara hasil nasionalisasi diberbagai daerah itu dijadikan satu menjadi Perusahaan Listrik Negara dibawah pimpinan (badan usaha) PLN.

Sejarah ketenagalistrikan di Indonesia dimulai tanggal 27 Oktober 1945 yang mempunyai nilai historis dan nilai formal sebagai mulainya pengelolaan ketenagalistrikan secara nasional di Indonesia. Hari bersejarah ini, diperingati pertama kalinya pada tanggal 27 Oktober 1946 bertempat di gedung Badan Pekerjaan Komite Nasional Indonesia (BPKNIP), Jalan Malioboro - Yogyakarta. Melalui Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1134.K/43/M.PE/1992 tanggal 31 Agustus 1992 tentang **Hari Listrik Nasional**. Penetapan hari listrik nasional dalam rangka usaha untuk meningkatkan idealisme, motivasi dan semangat kerja, memupuk jiwa karsa, rasa persatuan dan kesatuan dikalangan masyarakat ketenagalistrikan. Peristiwa ini ditetapkan kembali untuk diperingati setiap tahun sebagai **Hari Listrik Nasional**.

Selanjutnya dalam perkembangan Perusahaan Listrik Negara diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1982. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut diubahlah Perusahaan Listrik Negara menjadi Perusahaan Umum. Dalam tahun 1985 dikeluarkan Undang-undang Nomor 15 yang memungkinkan swasta untuk turut dalam penguasaan tenaga listrik bagi kepentingan umum.

Pada tahun 1994 terdapat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34 tahun 1994 tentang pengalihan bentuk Perusahaan Umum Listrik Negara menjadi Perusahaan perseroan terhitung tanggal 1 Agustus 1994.

PT. PLN (Persero) Situbondo merupakan cabang dari PT. PLN Distribusi Jawa Timur yang terletak di Jalan Cempaka Nomor 35 Situbondo PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo membawahi beberapa ranting diantaranya adalah ranting Panarukan, ranting Besuki, ranting Asembagus dan ranting Bondowoso (mulai 1 Januari 1998). Saat ini PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo memiliki 140 pegawai dengan status pegawai tetap.

### **2.1.1 Visi dan Misi PT. PLN (Persero) Distribusi**

#### **Filosofi PT. PLN (persero) Distibusi:**

Bagi kami bekerja adalah amanah, oleh karena itu harus dapat memberikan manfaat bagi pelanggan , masyarakat dan lingkungan

#### **Visi PT. PLN (Persero) Distribusi:**

Sebagai perusahaan yang berpusat pada keunggulan sumber daya insani, kami selalu belajar menjadi yang terbaik melalui penerapan sistem manajemen standard tinggi.

#### **Misi PT. PLN (Persero) Distribusi:**

- 1) Menyediakan energi serta layanan terkait lain yang handal, kompetitif dan akrab lingkungan.
- 2) Memberikan produk dan layanan terbaik kepada pelanggan menuju zero complaint.
- 3) Mendorong peningkatan kemakmuran masyarakat.
- 4) Memberikan tingkat pengembalian yang memuaskan bagi pemegang saham.
- 5) Menyediakan lingkungan kerja yang partisipatif bagi insan PT. PLN (Persero) Distribusi jwa Timur serta mendorong tumbuhnya kelompok insan yang aktif dan bersemangat serta siap mencari tantangan.

## **2.2 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas**

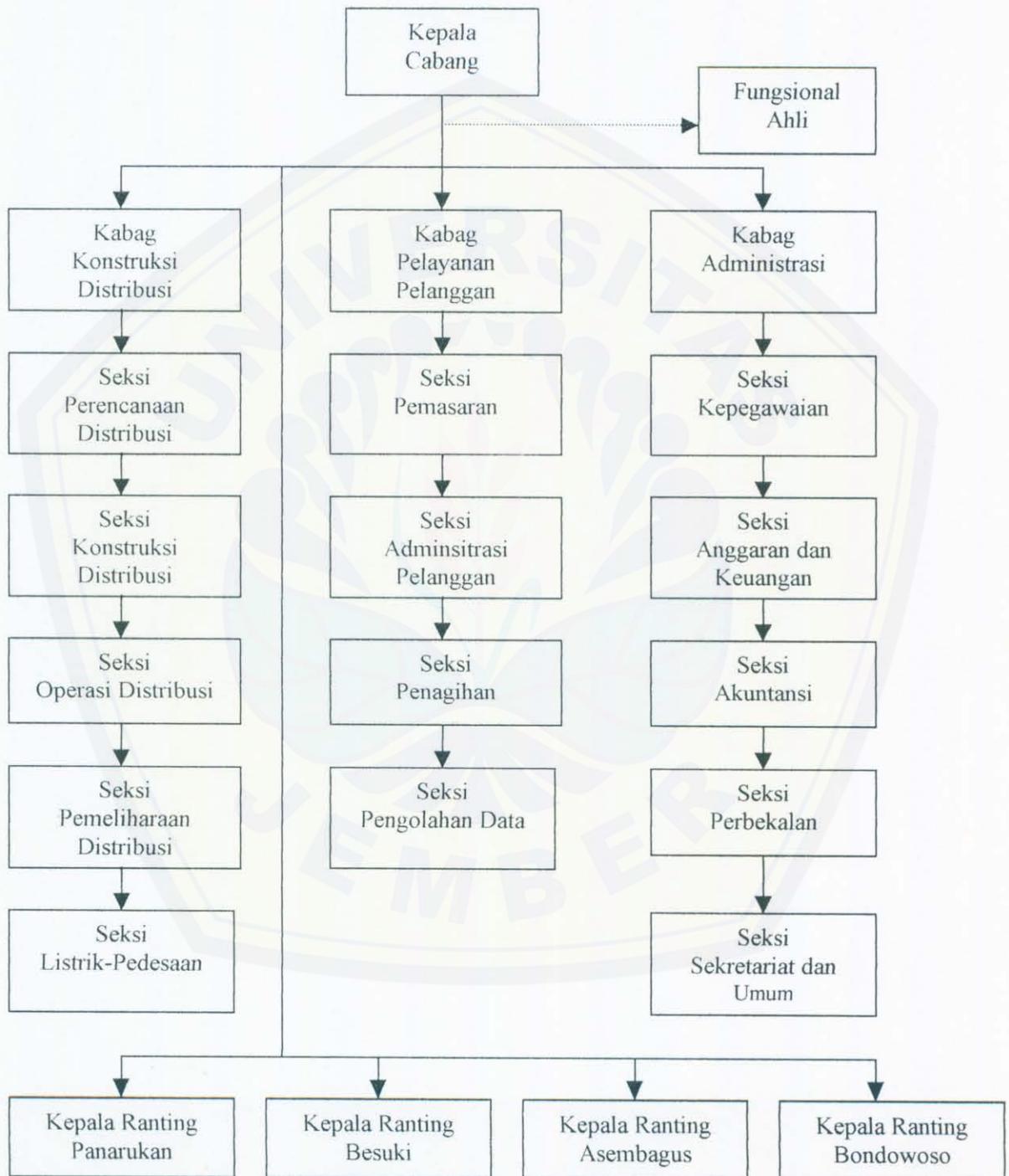
### **2.2.1 Struktur Organisasi**

Setiap badan usaha yang didirikan pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya kerjasama antara orang-orang yang terdekat didalamnya. Maka orang-orang maupun fungsi-fungsi dalam badan usaha tersebut harus ditetapkan, diatur dan disusun sehingga merupakan suatu kerangka yang menunjukkan hubungan-hubungan diantara pejabat-pejabat maupun bidang-bidang kerja satu sama lainnya sehingga jelas kedudukannya, wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam suatu kebulatan yang teratur.

Tujuan utama penyusunan struktur organisasi adalah untuk mempermudah pembagian dan pelaksanaan tugas-tugas tiap bagian yang berhubungan, baik secara langsung maupun tidak langsung guna pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Struktur Organisasi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo dapat dilihat dalam gambar berikut.

Gambar 1. Struktur organisasi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo.



Sumber data : PT. PLN ( Persero ) Cabang Situbondo

## 2.2.2 Uraian Tugas

### A) Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Cabang

- (1) Merumuskan sasaran kerja cabang berdasarkan target perusahaan dengan berpedoman pada ketentuan Perusahaan Listrik Negara (PLN) pusat, petunjuk serta kebijakan pelaksanaan pekerjaan dari unit perusahaan induk.
- (2) Menyusun konsep kebijakan teknis cabang berdasarkan program program kerja unit perusahaan induk sebagai bahan usulan.
- (3) Menganalisis serta mengevaluasi kinerja cabang dalam rangka pencapaian target-target yang telah ditetapkan.
- (4) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pendistribusian dan atau pembangkitan tenaga listrik agar sesuai dengan jadwal dan target perusahaan.
- (5) Memeriksa dan menandatangani bukti-bukti pengesahan, penerimaan dan pengeluaran uang cabang, SPK, surat dinas resmi lainnya yang menyangkut cabang sebagai upaya untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian.

### B) Fungsional Ahli

*Tugas pokok:*

Sebagai tenaga pemikir dan pemberi ide-ide dan masukan-masukan terhadap perkembangan perusahaan dan hanya bertanggung jawab kepada Kepala Cabang.

### C) Kepala Bagian Konstruksi dan Distribusi

*Tugas Pokok:*

Mengkoordinasikan serta mengendalikan perencanaan, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan pendistribusian tenaga listrik serta pembangunannya berikut bangunan listrik yang terkait. Kepala Bagian Konstruksi dan Distribusi bertanggung jawab kepada Kepala Cabang.

*Fungsi dari bagian konstruksi distribusi:*

- (1) Penyusunan rencana teknis konstruksi operasi dan pemeliharaan sarana pendistribusian tenaga listrik dan bangunan sipil yang terkait agar sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan perolehan dan pembebasan tanah untuk melaksanakan pembangunan konstruksi pendistribusian tenaga listrik agar sesuai dengan rencana.
- (3) Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan operasi dan pemeliharaan sarana pendistribusian tenaga listrik dan bangunan sipil yang terkait agar sesuai dengan target yang telah ditentukan.
- (4) Pengendalian pelaksanaan administrasi teknik untuk menunjang pelaksanaan pembangunan operasi dan pemeliharaan sarana pendistribusian tenaga listrik.
- (5) Penyusunan usulan Rencana Anggaran Operasi (RAO) khusus bagian distribusi dan konstruksi.

**a) Kepala Seksi Konstruksi Distribusi**

*Tugasnya:*

Mengatur dan mengarahkan kegiatan perencanaan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik, bangunan listrik dan bangunan sipil yang terkait untuk pelaksanaannya. Seksi ini bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kontruksi Distribusi.

**b) Kepala Seksi Perencanaan Distribusi**

*Tugasnya:*

Mengatur, mengarahkan bawahannya dalam rangka penyusunan rencana kerja, pengoprasian dan pemeliharaan serta penyusunan RAO/UAI dan pemantauan pemutakhiran data atau informasi jaringan distribusi sehingga dapat menunjang target atau sasaran yang telah ditetapkan. Seksi

ini bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Konstruksi Distribusi.

**c) Kepala Seksi Operasi Distribusi**

*Tugasnya:*

Mengatur dan mengarahkan pelaksanaan perbaikan jaringan yang berkaitan dengan pemasangan gardu, modifikasi serta perluasan jaringan agar keandalan pendistribusian tenaga listrik dapat terjaga dengan baik. Seksi ini bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Konstruksi Distribusi.

**d) Kepala Seksi Pemeliharaan Distribusi**

*Tugasnya:*

Menyusun rencana kegiatan, membagi tugas, membimbing bawahan, mengevaluasi hasil kerja bawahan dan menyusun program distribusi serta membuat laporan seksi pemeliharaan distribusi sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas. Seksi ini bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Konstruksi Distribusi.

**e) Kepala Seksi Listrik Pedesaan**

*Tugasnya:*

Menyusun rencana dan evaluasi pengembangan listrik pedesaan sebagai bahan pelaksanaan pembangunan dan pengusahaannya. Seksi ini bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Konstruksi Distribusi.

**f) Kepala Seksi Peneraan**

*Tugasnya:*

Mengawasi dan memberi petunjuk serta membagi tugas-tugas kepada teknisi peneraan dan juru administrasi peneraan untuk kelancaran pelaksanaan tugas peneraan

sehingga sasaran peneraan dapat tercapai. Seksi ini bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Konstruksi Distribusi.

#### **D) Kepala Bagian Pelayanan Pelanggan**

*Tugas Pokok:*

Melaksanakan penjualan tenaga listrik dan pengadministrasian pelanggan tenaga listrik. Kepala Bagian Pelayanan Pelanggan ini bertanggung jawab kepada Kepala Cabang.

*Fungsi dari bagian administrasi pelanggan:*

- (1) Penyusunan perkiraan kebutuhan tenaga listrik.
- (2) Penyusunan dan penerapan program penjualan tenaga listrik.
- (3) Mencatat jumlah pelanggan dan jenis tarif.
- (4) Penagihan rekening pemakaian tenaga listrik.
- (5) Pelaksanaan dan pengelolaan pelayanan pelanggan.
- (6) Pelaksanaan penyuluhan dan pemberian informasi kepada masyarakat atau pelanggan.

##### **a) Kepala Seksi Pemasaran**

*Tugasnya:*

Melaksanakan kegiatan penyusunan perkiraan kebutuhan tenaga listrik, penjualan tenaga listrik, penyuluhan dan survei data pelanggan tenaga listrik di wilayah kerjanya, menyusun rencana penjualan tenaga listrik dan langkah pencapaiannya. Seksi ini bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pelayanan Pelanggan.

##### **b) Kepala Seksi Administrasi Pelanggan**

*Tugasnya:*

Pelaksanaan pelayanan kepada calon pelanggan dan pelanggan tenaga listrik. Serta mengatur dan mengarahkan

kegiatan seksi administrasi pelayanan pelanggan yang meliputi pelayanan kepada calon pelanggan, pencatatan jumlah pelanggan, jenis tarif dan golongan rekening guna kelancaran pelanggan. Seksi ini bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pelayanan Pelanggan.

**c) Kepala Seksi Penagihan**

*Tugasnya:*

Mengatur dan mengarahkan kegiatan seksi penagihan meliputi penagihan dan pengisian pengiriman rekening untuk pencapaian optimasi penagihan. Seksi ini bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pelayanan Pelanggan.

**d) Kepala Seksi Pengolahan Data**

*Tugasnya:*

Mengatur dan mengarahkan kegiatan seksi pengolahan data yang meliputi aplikasi program pengolahan data, penyajian informasi dan penyimpanan data guna menciptakan sistem yang memadai. Seksi ini bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pelayanan Pelanggan.

**E) Kepala Bagian Administrasi**

*Tugas Pokok:*

Melaksanakan pengurusan kepegawaian, keuangan, pajak, asuransi, kesekretariatan, perbekalan, dan keamanan. Kepala bagian ini bertanggung jawab kepada Kepala Cabang.

*Fungsi dari bagian administrasi:*

- (1) Perencanaan sumber daya manusia.
- (2) Pelaksanaan tata usaha penggajian dan pengupahan.
- (3) Pelaksanaan pembinaan kesejahteraan pegawai.

- (4) Penyusunan anggaran belanja dan pendapatan satuan organisasi terkait.
- (5) Pengolahan data dan daur kas.
- (6) Pengadaan material dan jasa borongan untuk pengoperasian dan pemeliharaan sarana pendistribusian tenaga listrik.
- (7) Perencanaan kebutuhan sarana tenaga kerja.
- (8) Penyimpanan dan pengendalian persediaan material pengoperasian dan pemeliharaan sarana pendistribusian tenaga listrik.
- (9) Pelaksanaan kesekretariatan dan rumah tangga.
- (10) Pelaksanaan keamanan dan kesehatan lingkungan kerja.

**a) Kepala Seksi Kepegawaian**

*Tugasnya:*

Mengatur dan mengarahkan kegiatan kepegawaian yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, tata usaha kepegawaian, kesejahteraan pegawai, kesehatan dan kesehatan kerja (K3) guna kelancaran tugasnya. Seksi ini bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi.

**b) Kepala Seksi Anggaran dan Keuangan**

*Tugasnya:*

Penyiapan rencana kerja anggarannya, pemantauan anggaran belanja dan pendapatan cabang, pengolahan dana dan daur kas, pengasuransian harta kekayaan perusahaan, pencatatan pajak perusahaan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seksi ini bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi.

**c) Kepala Seksi Akuntansi**

*Tugasnya:*

Melaksanakan kegiatan pencatatan transaksi, aktiva tetap, pekerjaan dalam pelaksanaan serta persediaan barang serta

pembuatan laporan pembukuan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seksi ini bertanggung jawab Kepada Kepala Bagian Administrasi.

**d) Kepala Seksi Perbekalan**

*Tugasnya:*

Mengatur dan mengarahkan kegiatan dibidang perbekalan yang meliputi rencana pengadaan barang peralatan perbekalan berdasarkan kebutuhan. Seksi ini bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi.

**e) Kepala Seksi Kesekretariatan dan Umum**

*Tugasnya:*

Melaksanakan tata usaha kesekretariatan dan pengurusan rumah tangga serta keamanan lingkungan kerja. Seksi ini bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi.

**2.3 Jumlah Pegawai Pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo**

Tenaga kerja bagi perusahaan merupakan faktor yang sangat penting, karena keberhasilan usaha suatu perusahaan tidak lepas dari keberadaan dan kemampuan tenaga kerja, termasuk juga loyalitasnya pada perusahaan. Oleh karena itu perusahaan harus benar-benar memperhatikan tenaga kerja agar kegiatan perusahaan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Jumlah pegawai yang ada saat ini di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo adalah 140 orang karyawan. Komposisi pegawai di lingkungan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 1: Komposisi jumlah pegawai di PT. PLN (Persero)  
Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo**

No	Bagian	Jumlah Pegawai
1	2	3
1.	Kepala Cabang	1 orang
2.	Fungsional Ahli	2 orang
3.	Kepala bagian kontruksi Distribusi	1 orang
4.	Kepala Bagian Pelayanan Pelanggan	1 orang
5.	Kepala Bagian Administrasi	1 orang
6.	Sekretaris kepala cabang	1 orang
7.	Seksi Konstruksi Distribusi	4 orang
8.	Seksi Perencanaan Distribusi	3 orang
9.	Seksi Operasi Distribusi	3 orang
10.	Seksi Pemeliharaan Distribusi	5 orang
11.	Seksi Listrik Pedesaan	1 orang
12.	Seksi peneraan	3 orang
13.	Seksi pemasaran	1 orang
14.	Seksi Administrasi Pelanggan	2 orang
15.	Seksi Penagihan	1 orang
16.	Seksi Pengolahan data	4 orang
17.	Seksi Pembacaan meter	1 orang
18.	Seksi anggaran keuangan	2 orang
19.	Seksi Kepegawaian	4 orang
20.	Seksi Pembekalan	4 orang
21.	Seksi Akuntansi	4 orang
22.	Seksi sekretariat dan umum	6 orang
23.	Seksi PUKK	2 orang

1	2	3
24.	Seksi Pembangkitan PLTM	5 orang
25.	Gardu induk Situbondo	4 orang
26.	Ranting Besuki	9 orang
27.	Ranting Asembagus	8 orang
28.	Ranting Panarukan	8 orang
29.	Ranting Bondowoso	16 orang
30.	Kantor Jaga Prajeakan	3 orang
31	Gardu Induk Bondowoso	2 orang
	Jumlah	140 orang

Sumber Data: PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo Februari 2001

### BAB III

#### PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

##### 3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo yang bersifat magang ini selain memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan judul yang dipilih juga bertindak sebagai karyawan perusahaan, melaksanakan aktivitas dan membantu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan sebagaimana layaknya karyawan perusahaan.

Tugas yang dilaksanakan hanya pada ruang lingkup kepegawaian khususnya bidang perpajakan saja sehingga tugas-tugas bagian lain sedikit diketahui, hal ini sesuai dengan judul yang dipilih dalam laporan tugas akhir. Untuk mencari data-data yang diperlukan, pekerjaan yang dilakukan penulis dalam kegiatan magang sehari-hari hanya yang berhubungan dengan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, seperti penghasilan yang diterima pegawai termasuk tunjangan yang diperoleh oleh setiap pegawai tetap dan potongan yang yang diberlakukan dalam perusahaan.

Waktu kegiatan magang disesuaikan dengan jam kerja di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo yaitu lima hari kerja yaitu dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2: Alokasi Kegiatan Praktek Kerja Nyata**

**Di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo**

Hari	Jam Kerja	Jam istirahat
Senin - Kamis	07.30 – 16.00	12.00 – 12.30
Jum'at	07.30 – 16.00	11.30 – 12.30

*Sumber data: PT. PLN (Persero) Cabang Situbondo Februari 2001*

Adapun hari sabtu dan minggu PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo tidak melakukan kegiatan kantor atau libur.



Sebelum melaksanakan kegiatan magang, penulis mengadakan beberapa tahapan diantaranya:

- 1) Melakukan survei ke kantor PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang situbondo pada bagian kepegawaian dan menanyakan hal-hal yang harus dilengkapi sebelum kegiatan magang dilaksanakan.
- 2) Memberikan surat ijin permohonan magang dari bagian akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang ditujukan pada kantor PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo dan menunggu surat balasannya.
- 3) Setelah menerima surat balasan dari kantor PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo, penulis mengisi surat pernyataan yang diisi dengan benar dan harus mematuhi isi dari surat pernyataan tersebut selama kegiatan magang dilaksanakan.
- 4) Memberikan surat tugas dan surat pernyataan pada kantor PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo dan langsung melakukan kegiatan magang.

Adapun daftar kegiatan sehari-hari penulis dalam pelaksanaan magang dapat dilihat pada lampiran 1.

### **3.1.1 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atau terutang atas penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan.

#### ***Bunyi Pasal 21 ayat 1 Undang-undang nomor 17 tahun 2000:***

Pemotongan, penyeteroran dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh:

- a) Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.
- b) Bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain, sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.
- c) Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun.
- d) Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas.
- e) Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

Perseroan adalah PT. PLN (Persero) yang didirikan dengan akte notaris Sutjipto, S.H. Nomor 169 tahun 1994 beserta perubahannya. Pengertian pegawai menurut PT. PLN (Persero) adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan diangkat dan diberi penghasilan menurut ketentuan yang berlaku di PT. PLN (Persero).

PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo yang menangani bidang perpajakan khususnya mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah seksi kepegawaian. Pajak Penghasilan Pasal 21 Langsung ditangani oleh Kepala Seksi Kepegawaian dibantu oleh staf yang terdiri dari:

- 1) Juru Utama Kesejahteraan dan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja).
- 2) Juru Tata Usaha Kesejahteraan dan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja).
- 3) Juru Administrasi Kepegawaian.

Bidang ini langsung menangani masalah-masalah Perpajakan khususnya masalah Pajak Penghasilan Pasal 21 tentang besarnya Pajak Penghasilan yang dikenakan untuk pegawai tetap, pensiunan, honorarium

dan penghasilan yang bersifat final. Penulis disini membahas tentang penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk setiap pegawai tetap di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo.

Dalam penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo sudah menggunakan prosedur yang berlaku. Untuk menentukan berapa besarnya Pajak Penghasilan untuk setiap pegawai tetap di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo tersebut berdasarkan dari penghasilan neto yang di terima oleh setiap pegawai tetap. Penghasilan yang di terima oleh setiap pegawai tetap tersebut bisa dibedakan menjadi dua (2) yaitu :

**A) *Penghasilan yang bersumber dari gaji terdiri dari:***

**(1) *Gaji Sub Bruto***

Gaji sub bruto diperoleh dari gaji pokok dikalikan koefisien yang berlaku di PT. PLN Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo. Koefisien yang berlaku untuk bulan Januari – Mei tahun 1999 adalah 16 dan dalam bulan tersebut premi piket (piket gangguan, piket layanan) pajaknya disetorkan sendiri dan tidak bersamaan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21. sedangkan untuk bulan mei - desember tahun 1999 koefisien yang berlaku adalah 18 sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Direksi dan untuk premi piket pajaknya disetorkan bersama dengan Pajak Penghasilan pasal 21. Gaji pokok yang berlaku untuk setiap pegawai tetap di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo adalah dilihat dari peringkat jabatan dan golongan pegawai. Apabila golongan pegawai semakin tinggi maka peringkat jabatannya semakin rendah. Semakin kecil peringkat jabatan pegawai, maka semakin besar gaji pokok yang diterima setiap bulannya. Besarnya gaji pokok yang diterima, sudah ditentukan dari Direksi PT. PLN (Persero).

**Rumus:  $Gaji\ pokok \times Koefisien$**

**Contoh:**

Seorang pegawai tetap dengan gaji pokok Rp. 50.040, maka besar dari gaji sub bruto karyawan tersebut adalah:

Gaji sub bruto: Rp. 50.040 x 18 = Rp. 900.720

**B) Tunjangan**

Tunjangan yang diperoleh oleh setiap pegawai PT. PLN (persero) Distribusi Jawa Timur Cabang situbondoini bersifat tetap. Tunjangan tetap adalah suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk pekerja dan keluarganya. Tunjangan yang diberikan di PT. PLN (persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo ini terdiri dari 6 jenis tunjangan dan pembayarannya kepada setiap pegawai berdasarkan dari peringkat jabatan. Yang dimaksud peringkat jabatan adalah serangkaian urutan jabatan mulai dari peringkat jabatan terendah sampai dengan peringkat jabatan tertinggi di lingkungan PT. PLN (Persero) yang ditentukan oleh direksi. Adapun 6 jenis tunjangan tersebut adalah sebagai berikut:

**(1) Tunjangan Keluarga**

Tunjangan keluarga ini diberikan oleh perusahaan kepada setiap pegawai tetap sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap kesejahteraan pegawai. Tunjangan keluarga ini diberikan kepada isteri dan anak dari pegawai yang menjadi tanggungan. Besarnya tunjangan keluarga ini berdasarkan dari gaji pokok dikalikan dengan prosentase yang berlaku. Besarnya prosentase tunjangan keluarga untuk isteri adalah 5% dari gaji pokok, sedangkan prosentase untuk anak adalah 2% dari gaji pokok. Jumlah anak yang menjadi tanggungan perusahaan maksimal adalah 3 (tiga) orang dan maksimal berusia 21 tahun. Apabila lebih dari 21 tahun anak tersebut sudah tidak menjadi tanggungan perusahaan, kecuali jika anak tersebut melanjutkan studinya, maka anak tersebut masih menjadi tanggungan perusahaan sampai berumur 25 tahun.

**Rumus:**

$$\text{Tunjangan Isteri} = \text{Gaji pokok} \times 5\%$$

$$\text{Tunjangan anak} = \text{Gaji pokok} \times 2\%$$

Contoh:

Seorang pegawai tetap PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo mempunyai gaji pokok Rp. 50.040 sebulan dan status karyawan KL/1-03/05 (artinya karyawan laki-laki mempunyai seorang isteri dan 3 orang anak, dan jumlah keseluruhan keluarga 5 orang).

$$\text{Tunjangan isteri} = \text{Rp. } 50.040 \times 5\%$$

$$= \text{Rp. } 2.502$$

$$\text{Tunjangan anak} = \text{Rp. } 50.040 \times 2\% \times 3$$

$$= \text{Rp. } 3.002$$

$$\text{Besarnya Tunjangan keluarga} = \text{Rp. } 2.502 + \text{Rp. } 3.002 = \text{Rp. } 5.504$$

**(2) Tunjangan Listrik**

Tunjangan listrik diperoleh oleh setiap pegawai berdasarkan dari peringkat jabatannya. Semakin kecil peringkat jabatan pegawai tersebut, maka semakin besar tunjangan listrik yang diterima pegawai setiap bulannya. Tarif tunjangan listrik bagi pegawai tetap PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo berdasarkan dari keputusan Direksi PT. PLN (Persero). Tunjangan listrik adalah sejumlah uang yang diberikan kepada pegawai dengan tujuan untuk membayar biaya listrik rumah tangga setiap bulannya bagi pegawai tetap PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo. Apabila biaya listrik rumah tangga karyawan tersebut melebihi dari tunjangan yang diberikan maka selebihnya ditanggung oleh karyawan yang bersangkutan. Jika sebaliknya tunjangan tersebut kurang dari tunjangan yang diberikan, maka sisanya diberikan kepada karyawan yang bersangkutan. Tarif Tunjangan listrik dapat dilihat pada lampiran 2.

### **(3) Tunjangan Transport**

Tunjangan transport adalah sejumlah uang yang diberikan kepada pegawai sebagai bantuan biaya transportasi dari tempat tinggal ke tempat kerja yang bersangkutan pergi pulang dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Tunjangan transport tidak diberikan kepada:

- (a) Pegawai yang mendapat fasilitas kendaraan bermotor milik atau yang disediakan oleh perseroan. Misal: kepala cabang dan kepala bagian.
- (b) Pegawai yang membawa dan atau menggunakan kendaraan bermotor milik atau yang disediakan oleh perseroan untuk keperluan transportasi sehari-hari dari rumah tempat tinggalnya ke tempat kerja.

Tunjangan transport diberikan pada setiap pegawai tetap PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo. Tunjangan transport diperoleh juga berdasarkan dari peringkat jabatan setiap pegawai. Semakin kecil peringkat jabatan dari pegawai maka semakin besar tunjangan transport diperolehnya setiap bulan. Apabila pegawai tersebut melakukan tugas kantor atau perjalanan dinas ke luar kota maka atas biaya transportasi keluar kota tersebut ditanggung oleh perseroan. Perjalanan dinas adalah perjalanan yang dilakukan oleh pegawai untuk kepentingan perseroan baik di dalam negeri atau ke luar negeri atas perintah pejabat yang berwenang termasuk perjalanan pendidikan dan pelatihan, perjalanan pengobatan, perjalanan pindah dinas, perjalanan pensiun. Perjalanan dinas diberikan berdasarkan kategori perjalanan yang disusun sesuai jenjang jabatan dan setiap perjalanan dinas dilakukan berdasarkan surat perintah perjalanan dinas (SPPD). Untuk biaya perjalanan dinas tidak dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21. Tarif tunjangan transport dapat dilihat pada lampiran 3.

### **(4) Tunjangan Perumahan**

Bantuan pengganti fasilitas perumahan atau tunjangan perumahan adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada pegawai sebagai pengganti

fasilitas perumahan oleh perseroan. Satu usaha dalam bidang kesejahteraan pegawai adalah perumahan, namun mengingat keterbatasan kemampuan perusahaan belum dapat memberikan fasilitas perumahan bagi seluruh pegawai. Dalam rangka memenuhi kewajiban perusahaan mengadakan fasilitas perumahan kepada pegawai diberikan tunjangan perumahan setiap bulannya dalam bentuk sejumlah uang sesuai dengan peringkat jabatannya. Semakin kecil peringkat jabatan pegawai, maka semakin besar uang yang diperolehnya. Apabila pegawai tersebut (khusus Kepala cabang) memperoleh rumah dinas, maka tunjangan yang diterima hanya 25% dari besar tunjangan perumahan yang diperolehnya. Tarif tunjangan perumahan dapat dilihat pada lampiran 4.

**(5) *Tunjangan Kompensasi Jabatan***

Tunjangan kompensasi jabatan ini tidak setiap pegawai memperolehnya. Karena tunjangan ini hanya diberikan kepada pegawai yang mempunyai peringkat 20 (dua puluh) keatas. Semakin kecil peringkat jabatan yang dimiliki pegawai, maka semakin besar uang yang diperoleh setiap pegawai tersebut. Tunjangan yang diperoleh untuk pegawai yang mempunyai peringkat 20 (dua puluh) keatas ini besarnya didasarkan pada angka tunjangan jabatan dikalikan dengan tarif dan juga dikalikan dengan koefisien. Besarnya koefisien untuk daerah Jawa termasuk Jawa Timur adalah 1,0 (satu).

**(6) *Tunjangan Kompensasi karya***

Tunjangan kompensasi karya adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai sebagai kompensasi atas keberhasilan karya yang dilaksanakan sehari-hari secara berhasil guna dan berdaya guna. Pemberian tunjangan kompensasi karya dilakukan dengan tujuan untuk lebih meningkatkan gairah kerja dan disiplin kerja pegawai, sehingga produktivitas pegawai sebagai kontribusi terhadap pencapaian sasaran

perseroan meningkat. Pembayaran tunjangan kompensasi karya ini merupakan hasil nilai absen dan nilai hasil kinerja pegawai pada bulan sebelumnya dan pembayarannya diberikan pada bulan berikutnya. Untuk pemberian Tunjangan kompensasi karya ini tidak bersamaan dengan penghasilan dan tunjangan-tunjangan diatas. Dalam pemberian Tunjangan Kompensasi Karya ada beberapa prosedur yaitu:

**A) Membuat Laporan Aktivitas Karyawan**

Mengenai laporan aktivitas karyawan dengan karyawan lainnya berbeda. Hal ini disebabkan karena setiap pegawai memiliki aktivitas, kegiatan, dan keperluan yang berbeda dalam hal urusan pekerjaannya sesuai dengan bidangnya masing-masing, misal: melakukan perjalanan dinas, cuti, dapat ijin dari Kepala Cabang, sehingga jumlah jam kerja akan berbeda. Dan laporan aktivitas karyawan dicetak dalam komputer yang dihubungkan dengan mesin *Check Clock*.

Adapun bentuk dan pengisian dari laporan aktivitas karyawan pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo nampak pada table berikut.

**Tabel 3: LAPORAN AKTIVITAS KARYAWAN**

**PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur**

**Cabang Situbondo**

**Tgl cetak: 07/03/2001**

Kedudukan: 03004122 Data: 492190J

Tanggal	Hari	Masuk Kerja	Keluar kerja	Terlambat masuk kerja	Pulang sebelum waktunya	Jml jam lembur	Bobot TKK	Jml piket	k e t
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01/1/01	kamis	07:03	16:00				8.00	28.8	
02/2/01	Jum'at	07:00	16:18				8.00	28.8	
03/2/01	Sabtu								
04/2/01	Minggu								
05/2/01	Senin	07:24	16:21				8.00	28.8	
06/2/01	selasa	07:10	16:39				8.00	28.8	
07/2/01	Rabu	07:28	16:28				8.00	28.8	
08/2/01	kamis	07:28	16:47				8.00	28.8	
09/2/01	Jum'at	07:00	16:07				8.00	28.8	
10/2/01	Sabtu								
11/2/01	Minggu								
12/2/01	Senin	07:24	16:16				8.00	28.8	
13/2/01	selasa	07:26	16:13				8.00	28.8	
14/2/01	Rabu	07:21	16:00				8.00	28.8	
15/2/01	kamis	07:08	16:09				8.00	28.8	
16/2/01	Jum'at	07:00	16:10				8.00	28.8	
17/2/01	Sabtu								
18/2/01	Minggu								
19/2/01	Senin	07:16	16:14				8.00	28.8	
20/2/01	selasa	07:23	17:27				8.00	28.8	

1	2	3	4	5	6	7					8	9	10
21/2/01	Rabu	07:20	16:18								8.00	28.8	
22/2/01	kamis	07:15	17:06								8.00	28.8	
23/2/01	Jum'at	06:11	17:23								8.00	28.8	
24/2/01	Sabtu												
25/2/01	Minggu												
26/2/01	Senin	07:12	17:13								8.00	28.8	
27/2/01	selasa	07:04	17:08								8.00	28.8	
28/2/01	Rabu	07:13	17:17								8.00	28.8	
Total poin											160.0	576	

**Sumber Data:** PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo Februari 2001

**Keterangan:**

(1) Kolom tanggal:

Tanggal masuk kerja efektif selama satu (1) bulan.

(2) Kolom hari

Hari efektif masuk kerja yaitu hari senin sampai jum'at, hari sabtu dan minggu libur.

(3) Kolom masuk kerja:

Waktu mulai masuk kerja atau kantor yaitu dimulai jam 07.30 WIB.

(4) Kolom keluar kerja:

Waktu meninggalkan kegiatan kantor yaitu berakhir jam 16.00 WIB.

(5) Kolom terlambat masuk kerja:

Jika ada pegawai yang terlambat masuk sesuai ketentuan perusahaan.

(6) Kolom pulang sebelum waktunya:

Jika ada pegawai yang meninggalkan kantor sebelum waktunya pulang

(7) Kolom jumlah jam lembur:

Banyaknya jam lembur setiap pegawai yang melakukan tugas lembur.

(8) Kolom jumlah jam kerja:

Jumlah jam kerja sehari yaitu mulai jam 07.30 sampai 16.00

(9) Kolom bobot Tunjangan Kompensasi Karya:

Bobot sehari jam kerja efektif yaitu 8 jam dengan bobot Tunjangan Kompensasi Karya sebesar 28,8.

(10) Kolom kode alasan:

Kode pegawai tidak masuk kerja atau kode pegawai meninggalkan kantor sebelum waktunya, misal: cuti, melakukan perjalanan dinas, dapat ijin dari kepala.

*Adapun prosedur untuk menyiapkan data laporan aktivitas karyawan adalah:*

o Alat Check Clock

Alat ini bekerja secara otomatis menyimpan data mengenai jam masuk dan jam keluar kantor setiap pegawai PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo. Perlu diketahui alat ini sudah dihubungkan dengan komputer.

o Komputer

Komputer mengeluarkan data Tunjangan Kompensasi Karya setiap bulan sesuai dengan waktu setiap pegawai masuk dan keluar kantor.

o Pengeditan Data

Data laporan aktivitas karyawan dapat diperbaiki sedikit untuk membenarkan kekurangan waktu bagi setiap pegawai, dengan ketentuan waktu mengalami kekurangan itu masih bisa ditolirir.

### **B) Membuat Laporan Bulanan Koefisien Kinerja Pegawai**

Tujuan dari laporan bulanan koefisien kinerja pegawai adalah untuk melihat skor total dari setiap pegawai yang nantinya akan diketahui skor setiap pegawai termasuk kategori kurang, sedang, baik, baik sekali, atau istimewa. Dan pelaksanaan penilaian laporan bulanan koefisien kinerja pegawai dilakukan oleh kepala seksi masing-masing bagian.

Adapun bentuk dan pengisian laporan bulanan koefisien kinerja pegawai untuk setiap bulannya nampak pada tabel berikut.

**Tabel 4: Laporan Bulanan Koefisien Kinerja Pegawai  
PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo  
Laporan Bulan Februari 2001**

No	Faktor Penilaian	Bobot Jam Kerja					Skor Total	K e t
	Penilaian Rentangan Nilai	Kurang	Sedang	Baik	Baik sekali	Istimewa		
		0-50	51-65	66-75	76-90	91-100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Inisiatif					82	82	
2.	Mutu, kuantitas, serta keuletan dalam mewujudkan pekerjaan					84	84	
3.	Kedisiplinan dalam menjalankan tugas pekerjaan					83	83	
4.	Kesadaran akan tanggung jawab dalam bekerja					85	85	
5.	Hubungan kerja sama dengan atasan atau dengan sesama rekan					83	83	
6.	Kerajinan dalam masuk kerja					83	83	
7.	Hal yang menonjol secara positif sehingga perlu catatan khusus	Uraikan:				Total	499	
						Rata-rata	83,16	
						Kategori	BS	
						Koefisien Kinerja	1,1	

Sumber data: PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo Bulan Februari 2001

**Keterangan:**

Kategori:

1	Istimewa	: koefisien 1,2
2	Baik sekali	: koefisien 1,1
3	Baik	: koefisien 1,0
4	Sedang	: koefisien 0,8
5	Kurang	: koefisien 0,6

**Keterangan:**

(1) Kolom nomor:

Nomor urut penilaian dari angka 1-7

(2) Kolom faktor penilaian:

Kriteria penilaian yang dilakukan oleh kepala seksi

(3) Kolom bobot jam kerja termasuk kategori kurang (0 - 50)

(4) Kolom bobot jam kerja termasuk kategori sedang (51-65)

(5) Kolom bobot jam kerja termasuk kategori baik (66-75)

(6) Kolom bobot jam kerja termasuk kategori baik sekali (76-90)

(7) Kolom bobot jam kerja termasuk kategori istimewa (91-100)

(8) Kolom skor total:

Jumlah total dari penilaian bobot jam kerja

(9) Kolom keterangan

Apabila ada catatan-catatan khusus dari kepala seksi masing-masing bagian.

**C) Perhitungan Tunjangan Kompensasi Karya**

Perhitungan tunjangan kompensasi karya di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo disesuaikan dengan peringkat jabatan dan golongan setiap pegawai. Adapun cara perhitungannya adalah dengan cara:

**Nilai TKK = Jumlah Nilai Aktivitas x Koefisien Kinerja Bulanan**

**Besarnya TKK= Nilai TKK x Tarif TKK**

*Keterangan:*

(a) Jumlah Bobot Jam Kerja 1 bulan (JNA: jumlah nilai aktivitas):

Angka yang ditetapkan sebagai bobot untuk kelompok jam kerja yang ditentukan dan digunakan dalam perhitungan Tunjangan Kompensasi Karya. Bobot jam kerja satu (1) harinya adalah 28,8.

(b) Tarif Tunjangan Kompensasi Karya

Tarif yang telah disesuaikan oleh PT. PLN (Persero) Kantor Pusat dapat dilihat pada lampiran 5.

(c) Koefisien Kinerja Bulanan

Angka yang ditetapkan sebagai faktor Koefisien Kinerja untuk mengukur hasil karya, prestasi dan kerajinan yang dilaksanakan oleh pegawai pada kelompok jam kerja yang ditentukan.

#### **D) Waktu Pemberian Tunjangan Kompensasi Karya**

Pemberian tunjangan kompensasi karya kepada setiap pegawai diberikan setiap tanggal 15 tiap bulannya, disamping gaji pokok yang dibayarkan tiap awal bulan. Adapun besarnya tunjangan kompensasi karya yang diberikan kepada setiap pegawai berbeda, sesuai dengan aktifitas kedisiplinan pegawai selain peringkat jabatan.

Selain pembayaran tunjangan kompensasi karya (TKK) pada tanggal 15, juga diberikan tunjangan beras dan gula. Pemberian tunjangan beras dan gula yang diberikan pada karyawan kantor PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo ini diberikan dalam bentuk uang berdasarkan harga beras dan gula yang berlaku dipasaran. Jumlah maksimal anggota keluarga ditanggung satu orang isteri dan tiga orang anak dengan ketentuan setiap jiwa mendapatkan beras 10 kilogram dan gula 0,5 kilogram.

Contoh:

Seorang pegawai tetap PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo mempunyai susunan keluarga KL/1-03/05, jumlah seluruh jiwa 5 orang.

Harga beras 1 kilogram=Rp. 4000

Harga gula 1 kilogram =Rp. 4000

Jumlah tunjangan beras dan gula yang diperoleh sebesar:

50 kg beras x Rp.4000=Rp.200.000

2,5 kg gula x Rp.4000=Rp. 10.000 +

Rp.210.000

Setelah diatas diuraikan tentang prosedur pemberian Tunjangan Kompensasi Karya, maka berikut ini diberikan contoh perhitungan Tunjangan Kompensasi Karya pegawai tetap PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo.

**Contoh kasus:**

Seorang pegawai tetap PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo bagian akuntansi mempunyai koefisien kinerja bulanan pegawai 1,1 dan jumlah nilai aktivitas/bobot jam kerja selama satu bulan 604,80. Pegawai tetap tersebut menduduki peringkat 11 (tarif TKK=1125). Susunan keluarga pegawai tersebut adalah KL/1-03/05. Hitung besarnya Tunjangan Kompensasi Karya yang diterima oleh pegawai tetap tersebut.

**Jawab:**

Nilai TKK= bobot jam kerja x koefisien kinerja

$$= 604,80 \times 1,1$$

$$= 665,28$$

Besarnya TKK=Rp.1125 x 665,28

$$=Rp.748.440$$

Tunjangan beras= 50 kg x 4000 =Rp. 200.000

Tunjangan gula = 2,5 kg x 4000=Rp. 10.000 +

Rp.210.000

TKK Yang dibayar = besarnya TKK + Tunjangan beras dan gula

$$=Rp. 748.440 + Rp.210.000$$

$$=Rp.958.440$$

### Pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 21

Pengurangan yang diperbolehkan untuk mengurangi penghasilan dari pegawai tetap pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang situbondo adalah:

1) Biaya jabatan

Yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 1.296.000 setahun atau Rp. 108.000 sebulan.

- 2) Iuran yang terikat pada gaji kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan. Untuk PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo, mewajibkan kepada pegawai tetapnya sebagai peserta Dana Pensiun PLN untuk membayar iuran peserta yang dipotong setiap bulan dari gaji pegawai yang bersangkutan sebesar 6% dari Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) dengan ketentuan besarnya koefisien PhDP=18 atau dihitung dengan rumus:

$$\text{Besar iuran Pensiun} = 6\% \times (\text{gaji pokok} \times 18)$$

**Contoh:**

Seorang pegawai tetap PT. PLN (Persero Distribusi Jawa Timur mempunyai gaji pokok sebulan sebesar Rp. 50.040.

$$\begin{aligned} \text{Besar iuran pensiun} &= 6\% \times \text{Rp. } 50.040 \times 18 \\ &= \text{Rp. } 54.043 \end{aligned}$$

- 3) Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun, yang berlaku mulai Tahun Pajak 1999 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.04/1998 tanggal 27 Juli 1998, adalah:

- (1) Rp.2.880.000 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
- (2) Rp.1.440.000 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;

- (3) Rp.2.880.000 tambahan bagi Wajib Pajak yang isterinya menerima/ memperoleh penghasilan yang digabung dengan penghasilannya;
- (4) Rp.1.440.000 tambahan untuk anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak tiga (3) orang untuk setiap keluarga.

### **Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21**

Berdasarkan ketentuan pasal 17 (1) Undang-undang nomor 10 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan, besarnya tarif Pajak penghasilan yang ditetapkan atas penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri di Indonesia melalui suatu Bentuk Usaha Tetap di Indonesia sebagai berikut :

Sampai dengan Rp. 25.000.000	10%
Diatas Rp. 25.000.000-Rp.50.000.000	15%
Diatas Rp. 25.000.000	30%

Untuk menghitung besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 maka berikut ini dilampirkan tabel daftar pembayaran gaji dan Tunjangan Kompensasi Karya pegawai tetap PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo.

Tabel 5:Daftar Pembayaran Gaji

Bulan Juli 1999

PT .PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur

Cabang Situbondo

N 0	Nama, No.induk, Susklrg	Peringkat, G.pokok	G.sub bruto, T.klrg, G. Bruto	T. Listrik, T. Transport, T: Perum TKJ	Bantuan pajak, Jml gaji	I Pensiun, I Persh	Dibyrkan, Pot macarri- macam	Jml bersih, dibulatkan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Hasan 6187001A kl/1-03/5	11 50.040	900.720 5.504 906.224	230.000 0 45.000 407.000	0 1.588.224	54.043 54.907	1.543.181 24.700	1.509.481 1.509.450
2	Tutik 4869159J kp/0-01/2	16 47.400	853.000 948 854.148	130.000 126.000 82.500 198.000	0 1.300.648	51.192 52.011	1.339.456 19.300	1.320.156 1.320.150

Sumber Data: PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo tahun 1999

Tabel 6:Daftar Pembayaran Tunjangan Kompensasi Karya

Bulan Juli 1999

PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur

Cabang Situbondo

N 0	Nama No.induk	Sus KLRG Peringkat	J.N.A TRP.TKK	RPH. TTK Koef.kinerja	T. Beras T. Gula	TKK dibyr tiap bulan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Hasan 6187001A	KL/1-03/05 11	604,80 1125	748.440 1,1	200.000 10.000	958.440
2.	Tutik 4869159J	KP/0-01/02 16	547,20 810	443.235 1,0	80.000 4.000	527.235

Sumber Data: PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo tahun 1999

**Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo :**

**1. Hasan**

Gaji pokok -----	Rp. 50.040,00
Gaji sub bruto 18 x Rp. 50.040,00 = -----	Rp. 900.720,00
Tunjangan Keluarga 11% x Rp.50.040,00= -----	Rp. 5.504,00
Tunjangan Listrik -----	Rp. 230.000,00
Tunjangan Transport -----	Rp. 0,00
Tunjangan Perumahan -----	Rp. 45.000,00
Tunjangan Kompensasi Jabatan -----	Rp. 407.000,00
Tunjangan Kompensasi Karya -----	Rp. 958.440,00 +
Gaji kotor sebulan -----	<u>Rp.2.546.664,00</u>
Dikurangi=	
1. Biaya Jabatan	
5% x Rp.2.546.664,00= -----	Rp.108.000,00
2. Iuran Pensiun	
6% x 18 x Rp.50.040,00= -----	<u>Rp. 54.043,00 +</u>
	<u>Rp. 162.043,00 _</u>
Penghasilan Neto sebulan -----	Rp. 2.384.621,00
Penghasilan Neto setahun x 12 -----	Rp.28.615.452,00
PTKP=	
WP = Rp.2.880.000,00	
Kawin = Rp.1.440.000,00	
3 anak = <u>Rp.4.320.000,00 +</u>	
	<u>Rp. 8.640.000,00 _</u>
Penghasilan Kena Pajak -----	<u>Rp. 19.975.452,00</u>
Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21:	
10% x Rp. 19.975.452 = Rp. 1.997.545	
Pajak Penghasilan pasal 21 sebulan=1/12 x Rp.1.997.544 = Rp. 166.462,00	

### **3.2 Penilaian Terhadap Kegiatan Perusahaan Dalam Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan.**

Penilaian dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo sudah baik. Penilaian baik disini dalam arti sudah sesuai dengan prosedur Peraturan Perpajakan yang berlaku pada saat ini.

Dalam menentukan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang untuk setiap pegawai tetap PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo tidak menghitung secara manual di seksi kepegawaian, melainkan sudah ditentukan dari PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur. Seksi kepegawaian sudah menerima perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap dan tugasnya hanya mengecek, melaporkan pada kantor Distribusi Jawa Timur apabila ada kesalahan perhitungan. Dalam penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur sudah sesuai dengan aturan perpajakan, artinya dalam menentukan Penghasilan Kena Pajak dari setiap pegawai tetap dan tarif yang digunakan sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Penghasilan yang diterima pegawai tetap setiap bulannya tidak dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. Karena pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 tidak dibebankan pada setiap pegawai, melainkan ditanggung oleh perusahaan. Perusahaan ingin meringankan beban pegawai dengan tidak dipotongkan Pajak Penghasilan Pasal 21 setiap bulannya. Jadi dalam Surat Pemberitahuan Masa Dan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajaknya atas nama perusahaan. Seandainya keuangan perusahaan sudah menipis maka Pajak Penghasilan Pasal 21 tersebut dipotongkan dari penghasilan pegawai setiap bulannya.

Penerimaan negara dari Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk pegawai tetap PT, PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo

meningkat dari tahun ke tahun. Karena penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap setiap tahunnya semakin bertambah, sehingga Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dikenakan semakin besar. Semakin besar penghasilan yang diterima maka semakin besar pula Pajak Penghasilan Pasal 21.

Prosedur penyelesaian yang menyangkut Surat pemberitahuan harus diperhatikan para Wajib Pajak. Setiap Wajib Pajak harus mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di Kantor Pelayanan Pajak. PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo mengambil sendiri Surat Pemberitahuan Masa dan mengisi dengan benar, jelas, lengkap. Setelah Surat Pemberitahuan tersebut diisi lengkap beserta lampiran-lampirannya diserahkan kembali ke kantor pelayanan pajak Banyuwangi, karena daerah Situbondo bagian dari wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi. Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo terakhir setiap tanggal 20 setelah akhir masa pajak dan terakhir tanggal 25 setelah akhir tahun pajak untuk Surat Pemberitahuan Tahunan. Untuk penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) terakhir setiap tanggal 10 bulan berikutnya melalui Bank Negara Indonesia 1946 Situbondo.

#### **BAB IV**

#### **PENUTUP**

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk dan kelancaran dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Dan terima kasih yang tiada terhingga kepada Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingannya kepada penulis.

Tak lupa juga kami sampaikan terima kasih yang tiada terhingga kepada segenap karyawan dan karyawan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo yang telah memberikan bantuan serta dukungannya, dan kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya Laporan Tugas Akhir ini.

Akhirnya dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini, harapan penulis mudah-mudahan dapat memberikan manfaat bagi pembaca yang berkepentingan pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

### DAFTAR PUSTAKA

1. Anonimus, Undang-undang Nomor 16 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 9 tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Anonimus, Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan.
3. Cyrus Sihaloloho, 1995, Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan, Rajawali Pers, Jakarta.
4. Mardiasmo, MBA, Akt, 1998, Perpajakan Edisi ke-6, Andi Offset, Yogyakarta.
5. Waluyo, MSc, MM, Akt dan Wirawan B. Ilyas, Msi, 1999, Perpajakan Indonesia, Salemba Empat.
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.04/1998 tentang faktor penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 521/KMK.04/1998 tentang besarnya biaya jabatan atau biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pegawai tetap atau pensiunan.
8. Keputusan Direksi PT. PLN (persero) Nomor 078.K/010/DIR/1998 tanggal 16 Oktober 1998 tentang penyesuaian koefisien Penghasilan Dasar Pensiun untuk perhitungan besarnya iuran pensiun dan atau manfaat pensiun.
9. Instruksi Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 012/DIR/1998 tanggal 16 Oktober 1998 tentang iuran pensiun dan cara pembayarannya.

## Lampiran 1:

**Daftar Kegiatan Magang  
Pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur  
Cabang Situbondo  
Tahun 2001**

Hari/Tanggal	Jenis Kegiatan	Keterangan
1	2	3
Senin 19-02-2001	Penyerahan Surat Tugas dan berkenalan dengan pimpinan dan seluruh karyawan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo.	Diterima oleh Kepala seksi Kepegawaian
Selasa 21-02-2001	Menerima pengarahan dari kepala seksi kepegawaian tentang kegiatan-kegiatan kepegawaian, khususnya kegiatan perpajakan.	Orientasi umum
Rabu 21-02-2001	Meminta penjelasan tentang sejarah singkat PT. PLN (Persero).	Orientasi umum
Kamis 22-02-2001	Menerima pengarahan dari Kepala Seksi Kepegawaian tentang struktur organisasi yang ada di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo.	Orientasi umum
Jum'at 23-02-2001	Membantu memasukkan daftar nama-nama pegawai ke komputer.	Proses data awal
Senin 26-02-2001	Membantu memasukkan daftar gaji dan tagihan listrik pegawai dilaporan rekap gaji serta potongan-potongan yang diberlakukan.	Proses data awal

1	2	3
Selasa 27-02-2001	Meminta penjelasan pada Kepala Seksi Kepegawaian tentang cara penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap dan unsur-unsur yang ada dalam penghasilan.	Pengolahan data Pajak
Rabu 28-02-2001	Meminta data pegawai atas penghasilan yang diterima pegawai tetap dalam satu bulan.	Kasus bagian 1
Kamis 01-03-2001	Meminta data tentang Surat Pemberitahuan masa dan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21.	Keterangan normative
Jum'at 02-03-2001	Meminta penjelasan tentang tunjangan-tunjangan yang diterima pegawai tetap PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo dalam satu bulan.	Data kesejahteraan
Selasa 06-03-2001	Meminta penjelasan tentang Tunjangan Kompensasi Jabatan yang diterima oleh pegawai yang menerimanya dan cara penghitungan Tunjangan Kompensasi Jabatan.	Kasus yang disoroti
Rabu 07-03-2001	Menerima penjelasan dari Kepala Seksi Kepegawaian tentang Tunjangan Kompensasi Karya dan unsur-unsur yang ada dalam perhitungan Tunjangan Kompensasi Karya.	Persiapan proses perhitungan
Kamis 08-03-2001	Mempelajari cara perhitungan Tunjangan Kompensasi Karya.	Proses penghitungan

1	2	3
Jum'at 09-03-2001	Meminta data tentang Tunjangan Kompensasi Karya yang setiap pegawai tetap.	Kasus bagian 2
Senin 12-03-2001	Membantu membuat laporan aktivitas karyawan selama satu bulan.	Proses aktivitas
Selasa 13-03-2001	Memasukkan nama-nama dan data-data setiap pegawai untuk mengetahui besarnya Tunjangan Kompensasi Karya yang diterima.	Proses penghitungan
Rabu 14-03-2001	Membantu mengecek dan mengeprint data Tunjangan Kompensasi Karya.	Hasil print out
Kamis 15-03-2001	Meminta penjelasan tentang penyampaian dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 bulanan dan tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak.	Proses setor tahunan
Jum'at 16-03-2001	Membantu mengecek Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap pada beberapa pegawai PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo.	Data rangkuman
Senin 19-03-2001	Penutupan kegiatan magang dan ramah tamah dengan pimpinan serta seluruh karyawan perusahaan. Pamitan dengan seluruh staf dan karyawan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo.	Selesai dan kembali ke kampus

## Lampiran 2 :

**Penyesuaian Tarif Tunjangan Listrik  
Bagi Pegawai PT. PLN (Persero)**

Peringkat Jabatan	Dalam Rupiah
1	2
0	600.000
1	550.000
2	500.000
3	450.000
4	415.000
5	385.000
6	355.000
7	320.000
8	300.000
9	280.000
10	255.000
11	230.000
12	215.00
13	190.000
14	175.000
15	150.000
16	130.000
17	110.000
18	100.000
19	85.000
20	70.000
21	60.000
22	55.000
23	50.000
24	45.000
25	40.000
26	35.000

Sumber data: PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo bulan Juni tahun 1999

## Lampiran 3 :

**Tunjangan Transport  
Bagi Pegawai PT. PLN (Persero)**

Peringkat Jabatan	Dalam Rupiah
1	2
0	495.000
1	450.000
2	423.000
3	396.000
4	368.000
5	342.000
6	316.000
7	297.000
8	270.000
9	252.000
10	234.000
11	216.000
12	198.00
13	180.000
14	162.000
15	144.000
16	128.000
17	108.000
18	99.000
19	90.000
20	81.000
21	72.000
22	68.000
23	64.000
24	61.000
25	57.000
26	54.000

Sumber Data: PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo bulan Juni tahun 1999

## Lampiran 4:

**Daftar Tunjangan Perumahan Bagi pegawai  
Di Lingkungan PT. PLN (Persero)**

Peringkat Jabatan	Tunjangan Perumahan perbulan (Rp)
1	2
0	550.000
1	500.000
2	435.000
3	395.000
4	360.000
5	325.000
6	295.000
7	270.000
8	245.000
9	225.000
10	200.000
11	180.000
12	165.000
13	150.000
14	140.000
15	125.000
16	110.000
17	100.000
18	90.000
19	85.000
20	80.000
21	75.000
22	70.000
23	65.000
24	60.000
25	55.000
26	50.000

Sumber Data: PT. PLN (persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo bulan Juni tahun 1999

## Lampiran 5:

**TARIF TUNJANGAN KOMPENSASI KARYA (TKK)  
BAGI PEGAWAI PT. PLN (PERSERO)**

PERINGKAT JABATAN	DALAM RUPIAH
1	2
0	2.615
1	2.375
2	2.215
3	1.990
4	1.855
5	1.745
6	1.620
7	1.500
8	1.370
9	1.290
10	1.195
11	1.125
12	1.060
13	1.000
14	935
15	875
16	810
17	750
18	685
19	620
20	530
21	485
22	440
23	400
24	370
25	350
26	330

*Sumber Data: PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo bulan Juni tahun 1999*

Lampiran 6

Lembar ke-1 untuk : Kantor Pelayanan Pajak  
Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Kepada Yth.  
Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Pajak  
**BANYUWANGI**..... (1)

di **BANYUWANGI**.

**SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 21 DAN PASAL 26**

Bersama ini diberitahukan bahwa jumlah PPh Pasal 21 dan Pasal 26 atas Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri yang telah dipotong dan disetor untuk masa bulan **JULI** tahun **1999**.....(2) adalah sebesar Rp. **9.568.730,--**.....(3)  
**# Sembilanjuta Lima ratus Enampuluh Delapanribu Tujuh ratus Tigapuluh Rupiah #**.....(3)  
dengan perincian dan penjelasan sebagai berikut:

A. PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang telah dipotong

Golongan Pegawai (1)	Jumlah Pegawai (2)	Jumlah Penghasilan Bruto (3)	PPh yang dipotong (Tarif x Penghasilan Bruto) (4)
1. Pegawai Tetap	138	Rp. 191.269.420,17	Rp. 9.523.520,--
2. Mantan Pegawai yang menerima Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi dan Bonus		Rp. ....	Rp. ....
3. Pensiunan dan Penerima Pembayaran berkala lainnya		Rp. ....	Rp. ....
4. Pegawai Harian/Mingguan		Rp. ....	Rp. ....
5. Pegawai Satuan		Rp. ....	Rp. ....
6. Pegawai Borongan		Rp. ....	Rp. ....
7. Pegawai Honorar/dokter	1	Rp. 753.500,--	Rp. 45.210,--
8. Penerima Honorarium		Rp. ....	Rp. ....
9. Penarikan Iuran Dana Pensiun pada Dana Pensiun		Rp. ....	Rp. ....
10. Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri		Rp. ....	Rp. ....
11. Penerima Imbalan Jasa (Orang Pribadi)		Rp. ....	Rp. ....
<b>J U M L A H</b>		Rp. 192.022.920,17	Rp. 9.568.730,--
Diperhitungkan kelebihan setor tahun sebelumnya			Rp. .... *)
PPh Pasal 21 dan Pasal 26 atas Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri yang masih harus disetor/kelebihan setor tahun sebelumnya yang belum diperhitungkan			Rp. .... **)

## B. PPh Pasal 21 yang dipotong final :

Penerima Penghasilan (1)	Jumlah Pegawai (2)	Jumlah Penghasilan Bruto (3)	PPh yang dipotong (Tarif x Penghasilan Bruto) (4)
1. Penerima Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua/Tabungan Hari Tua yang di bayarkan sekaligus, dan Hadiah atau Penghargaan Perlombaan	.....	Rp. ....	Rp. ....
2. Petugas Dinas Luar Asuransi dan Petugas Penjaja Barang yang menerima Komisi	.....	Rp. ....	Rp. ....
3. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI dan Pensiunan yang menerima Honorarium dan Imbalan lain yang dibebankan kepada Keuangan Negara Daerah	.....	Rp. ....	Rp. ....
<b>J U M L A H</b>		Rp. ....	Rp. ....

## C. Lampiran :

- Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan Pasal 26
- Lembar ke-3 Surat Setoran Pajak (SSP PPh Pasal 21/26)
- Lembar ke-2 Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan / atau Pasal 26 sebanyak 1 (# S a t u #) lembar

## D. Pernyataan :

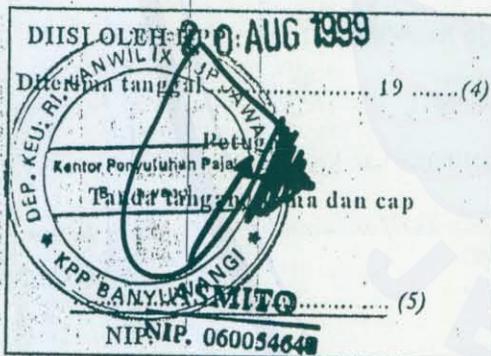
Dengan ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat.

Situbondo, 16 Agustus 1999 (6)

Pemotong Pajak (7)

Nama PT. PLN Cabang Situbondo

NPWP 1.001.629.3.627



\*) Untuk Pemotong PPh Pasal 21 Bendaharawan

Pemerintah tidak perlu mengisi

\*\*) Coret yang tidak perlu

Lampiran 7

LEMBAR **1**



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

(SURAT SETORAN PAJAK)

**( S S P )**

Untuk arsip WP

BANYUWANGI

NPWP : **1 - 001 - 629 - 3 - 627** *diisi sesuai kartu NPWP*  
 Nama WP : **PT. PLN ( PERSERO ) CABANG SITUBONDO**  
 Alamat WP : **Jl. Cempaka no. 35**  
**SITUBONDO** Kode Pos **68301**

Kode Jenis Pajak (MAP) Kode Jenis Setoran

**0 1 1 1** **1 0 0**

*Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1*

Uraian Pembayaran \*)

M a s a

Setoran :  Masa  Tahunan  Final  STP  SKPKB  SKPKBT

*Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan*

Tahun

*Diisi Tahun Pajak Setoran dimaksud*

Jan Feb Mar Apr Mei Jun ~~JUL~~ Ags Sep Okt Nop Des

*Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan*

**1999**

Nomor Ketetapan :  /  /  /  /

*Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT*

Jumlah Pembayaran

*Diisi dengan pembayaran rupiah penuh*

Rp. **9.568.730,--**

Terbilang

*Diisi dengan huruf*

**Sembilanjuta Limaratus Enampuluh Dela -  
panribu Tjuhratus Tigapuluh Rupiah ###**

Ruang Teraan

*Ditera oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro / KPKN*

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos di

Tanggal **10 AUG 1999**

*Cap dan tanda tangan*

**BANK PERSEPSI**

**CABANG SITUBONDO**

Nama Jelas :

\*) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman t  
 Tambahan Informasi :  
 - Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas  
 - Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangun



**PT. PLN ( PERSERO )  
DISTRIBUSI JAWA TIMUR  
CABANG SITUBONDO**

Lampiran 8

55

Jalan Cempaka No. 35 Situbondo 68301  
Telp. : ( 0338 ) 672905 s/d 672907  
Kotak Pos : 106

Telex :  
Faximile : 672908

Alamat Kawat :

Nomor : 033/ 547/STB/2000  
Surat Sdr. No. :  
Lampiran :  
Perihal : Perhitungan PPh.Pasal 21  
Tahun Takwin 1999.

Situbondo, 22 Maret 2000

Kepada

KANTOR PELAYANAN PAJAK  
BANYUWANGI  
Jl. Brawijaya No. 28  
Di  
BANYUWANGI

Bersama ini kami ini kami sampaikan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun takwin 1999 dari Karyawan / Karyawati beserta pensiunan PT. PLN (Persero) Cabang Situbondo.

Adapun perhitungan PPh Pasal 21 tahun Takwin 1999 yang dimaksud terdiri atas :

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| - SPT PPh Pasal 21 ( formulir 1721 )               | : 2 lembar              |
| - SPT PPh Pasal 21 ( formulir 1721 - A )           | : 2 lembar              |
| - SPT PPh Pasal 21 ( formulir 1721 - A1 )          | : 2 lembar              |
| - SPT PPh Pasal 21 ( formulir 1721 - A2 )          | : 2 lembar              |
| - SPT PPh Pasal 21 ( formulir 1721 - B )           | : 2 lembar              |
| - SPT PPh Pasal 21 ( formulir 1721 - C )           | : 2 lembar              |
| - Lampiran SPT PPh Pasal 21 ( formulir 1731 - A1 ) | : 139 lembar (menyusul) |

Perhitungan PPh. Pasal 21.

- |                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| ❖ PPh. Pasal 21 yang dihitung      | = Rp. 154.734.434,00        |
| ❖ PPh. Pasal 21 yang telah disetor | = <u>Rp. 165.755.084,00</u> |
| ❖ PPh. Pasal 21 lebih setor        | = <u>Rp. 11.020.650,00</u>  |

Selanjutnya terlampir disamping jumlah Perhitungan PPh Pasal 21 tahun takwin 1999 beserta foto copy bukti setor PPh. Pasal 21 tahun takwin 1999.

Demikian atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

# DATA IDENTITAS WAJIB PAJAK

NPWP : 1 0 0 1 6 2 9 3 6 2 7

B. NAMA WAJIB PAJAK : PT PLN (PERSERO) CABANG SITUBONDO

C. JENIS USAHA :  
SPESIFIKASI USAHA :

D. ALAMAT : JL. CEMPAKA NO. 35 SITUBONDO

E. KELURAHAN/  
KECAMATAN : DESA SUMBER KOLAK KEC. PANARUKAN

F. KOTA / KODE POS : SITUBONDO

• TANDA TANGAN : ISMONO  
WP / KUASA

**Perhatian** Untuk meningkatkan kelancaran dan mempermudah pelaksanaan pelayanan kami, maka demi kepentingan Saudara, diminta agar Daftar Isian ini Saudara isi secara lengkap dan jelas berdasarkan kondisi yang terakhir, serta melekatkannya pada SPT yang Saudara masukkan.

PELAYANAN DAN PENERIMAAN  
PAJAK DAN TUNJANGAN PAJAK  
(DIISI DARI FORMULIR 1721-A)

2.	PEGAWAI TIDAK TETAP/PENERIMA HONORARIUM DAN PENGHASILAN LAINNYA/PENERIMA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh PASAL 21 BERSIFAT FINAL/PEGAWAI DENGAN STATUS WAJIB PAJAK LUAR NEGERI (DIISI DARI FORMULIR 1721-B)	-	-	-
3.	J U M L A H (1 + 2)	139	2.702.856.664,-	53.798.666,-
4.	PPh PASAL 21/PASAL 26 YANG TELAH DISETOR .....			164.928.824,-
5.	STP PPh PASAL 21/PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK) .....			-
6.	J U M L A H (4 + 5) .....			164.928.824,-
7.	a. <input type="checkbox"/> PPh PASAL 21/ PASAL 26 YANG KURANG DISETOR (ANGKA 3 KOLOM 4 - ANGKA 6)			
	b. <input checked="" type="checkbox"/> PPh PASAL 21/ PASAL 26 YANG LEBIH DISETOR (ANGKA 6 - ANGKA 3 KOLOM 4)			11.130.158,-
	JUMLAH PADA ANGKA 7a TELAH DILUNASI PADA TANGGAL .....			
G.	PERMOHONAN PPh PASAL 21 YANG LEBIH DISETOR PADA ANGKA 7b MOHON DIPERHITUNGKAN DENGAN PEMBAYARAN PPh PASAL 21 UNTUK BULAN .....TAHUN .....2000....			
H.	LAMPIRAN SELAIN LAMPIRAN 1721- A, 1721 - A1 ATAU 1721 -A2, 1721-B, DAN 1721-C, BERSAMA INI KAMI LAMPIRKAN PULA :			
	1. <input type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK	4. <input type="checkbox"/> PEMBERITAHUAN PEMBETULAN NAMA DAN/ATAU ALAMAT		
	2. <input type="checkbox"/> SURAT KUASA KHUSUS	5. ....		
	3. <input type="checkbox"/> LAPORAN KEUANGAN KERJASAMA OPERASI, DALAM HAL PEMOTONG PAJAK ADALAH KERJASAMA OPERASI	6. ....		
I.	PERNYATAAN DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA TERMASUK SANKSI-SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, DAN JELAS.			
		Situbondo..... <del>27</del> Maret 2000.....		
	<input checked="" type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK	TANDA TANGAN		
	<input type="checkbox"/> KUASA	NAMA TERANG		

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PERHATIAN : • BACA BUKU PETUNJUK • ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK

FORMULIR  
**1721**

TAHUN TAKWIM

1 9 9 9

• BERI TANDA X DALAM  (KOTAK) YANG SESUAI

DIISI OLEH DINAS

1. TGL. SPT DISAMPAIKAN .....  
2. STATUS SPT   
3. N/K/L (F.7)   
4. LAMPIRAN   
5. KODE KLU

A. NPWP PEMOTONG PAJAK :

B. NAMA PEMOTONG PAJAK : PT PLN (PERSERO) CABANG SITUBONDO

C. ALAMAT PEMOTONG PAJAK : JL. CEMPAKA NO.35  
KOTA/KODE POS :

D. JENIS USAHA :

E. NAMA PIMPINAN :

F. DALAM TAHUN TAKWIM YANG BERSANGKUTAN TELAH MELAKUKAN PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 SEBAGAI BERIKUT :

GOLONGAN PEGAWAI	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPh PASAL 21/26 TERUTANG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN HARI TUA/TABUNGAN HARI TUA (THT) (DIISI DARI FORMULIR 1721-A)	139	2.702.856.664,-	153.798.666,-
2. PEGAWAI TIDAK TETAP/PENERIMA HONORARIUM DAN PENGHASILAN LAINNYA/PENERIMA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh PASAL 21 BERSIFAT FINAL/ PEGAWAI DENGAN STATUS WAJIB PAJAK LUAR NEGERI (DIISI DARI FORMULIR 1721-B)	-	-	-
3. JUMLAH (1+2)	139	2.702.856.664,-	153.798.666,-
4. PPh PASAL 21/PASAL 26 YANG TELAH DISETOR .....			164.928.824,-
5. STP PPh PASAL 21/PASAL 26.(HANYA POKOK PAJAK) .....			-
6. JUMLAH (4+5) .....			164.928.824,-
7. a. <input type="checkbox"/> PPh PASAL 21/ PASAL 26 YANG KURANG DISETOR (ANGKA 3 KOLOM 4 - ANGKA 6)			
b. <input checked="" type="checkbox"/> PPh PASAL 21/ PASAL 26 YANG LEBIH DISETOR (ANGKA 6 - ANGKA 3 KOLOM 4)			11.130.158,-
JUMLAH PADA ANGKA 7 a TELAH DILUNASI PADA TANGGAL .....			

G. PERMOHONAN  
PPh PASAL 21 YANG LEBIH DISETOR PADA ANGKA 7b MOHON DIPERHITUNGKAN DENGAN PEMBAYARAN PPh PASAL 21 UNTUK BULAN .....TAHUN ...2000....

H. LAMPIRAN  
SELAIN LAMPIRAN 1721- A, 1721 - A1 ATAU 1721 -A2, 1721-B, DAN 1721-C, BERSAMA INI KAMI LAMPIRKAN PULA :

1.  SURAT SETORAN PAJAK  
2.  SURAT KUASA KHUSUS  
3.  LAPORAN KEUANGAN KERJASAMA OPERASI, DALAM HAL PEMOTONG PAJAK ADALAH KERJASAMA OPERASI  
4.  PEMBERITAHUAN PEMBETULAN NAMA DAN/ATAU ALAMAT  
5. ....  
6. ....

I. PERNYATAAN  
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA TERMASUK SANKSI-SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, DAN JELAS.

Situbondo..... 23 Maret 2000 .....

PEMOTONG PAJAK TANDA TANGAN  
 KUASA NAMA TERANG

DAFTAR SETOBAN PAJAK PENGHASILAN ( PPh. pasal 21 ) TAHUN TAKWIM 1999  
KARYAWAN - KARYAWATI DAN PENSIUNAN PT. PLN CABANG SITUBONDO

No. :	BULAN	PEGAWAI	DOKTER	PENSIUN	Tanggal Setor	KETERANGAN
1.	JANUARI 1999	5.551.027	0	50.471	10-02-1999	
2.	FEBRUARI 1999	4.537.755	30.600	50.471	09-03-1999	
3.	MARET 1999	4.320.408	171.900	50.471	09-04-1999	
4.	APRIL 1999	4.664.039	111.210	50.471	10-05-1999	
5.	M E I 1999	4.474.285	7.280	50.471	08-06-1999	
6.	JUNI 1999	9.959.933	140.520	50.471	07-07-1999	
7.	JULI 1999	9.523.520	45.210	50.471	10-08-1999	
8.	AGUSTUS 1999	9.523.520	0	50.471	10-09-1999	
9.	SEPTEMBER 1999	9.720.194	176.880	105.623	08-10-1999	
10.	OKTOBER 1999	10.224.288	102.540	105.623	10-11-1999	
		3.261.571	0	0	10-11-1999	
11.	NOPEMBER 1999	10.479.171	60.570	105.623	10-12-1999	
12.	DESEMBER 1999	76.689.113	101.220	105.623	30-12-1999	
	JUMLAH :	164.928.824	957.050	826.260		

Situbondo, 21 Maret 2000



Milik UPT Perpustakaan  
UNIVERSITAS JEMBER

PT. PLN (PERSERO)  
DISTRIBUSI JAWA TIMUR  
CABANG SITUBONDO

**DAFTAR VENIFIKASI KEKURANGAN / KELEBIHAN SETOR PPh Pasal 21 TAHUN TAKWIN  
1999 PEGAWAI PT. PLN (PERSERO) CABANG SITUBONDO NOMOR : NPWP : 1.565.153.2-627**

NO	BULAN TAHUN 1999	TANGGAL SSP	JUMLAH	KETERANGAN
1	JANUARI	10-02-99	Rp. 5.551.027,-	
2	PEBRUARI	09-03-99	Rp. 4.537.755,-	
3	MARET	09-04-99	Rp. 4.320.408,-	
4	APRIL	10-05-99	Rp. 4.664.039,-	
5	MEI	08-06-99	Rp. 4.474.285,-	
6	JUNI	07-07-99	Rp. 9.959.933,-	
7	JULI	10-08-99	Rp. 9.523.520,-	
8	AGUSTUS	10-09-99	Rp. 9.523.520,-	
9	SEPTEMBER	08-10-99	Rp. 9.720.194,-	
10	OKTOBER	10-11-99	Rp. 13.485.859,-	
11	NOPEMBER	10-12-99	Rp. 10.479.171,-	
12	DESEMBER	30-12-99	Rp. 78.689.113,-	
Jumlah disetor			Rp. 164.928.824,-	
PPh terhitung tahun Takwin 1999			Rp. 153.798.666,-	
Kelebihan setor			Rp. 11.130.158,-	

Situbondo, 22 Maret 2000

Lampiran 13

PT. PLN (PERSERO)  
DISTRIBUSI JAWA TIMUR  
CABANG SITUBONDO

SURAT KETERANGAN

Nomor : 31 /492/STB/2001

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Ir. RUSBANDI  
Nomor Induk : 5485008-J  
Jabatan : KEPALA PT. PLN (PERSERO) CABANG  
SITUBONDO

Dengan ini menerangkan :

N a m a : EVI YORITASANTI  
Jurusan / Prody : PERPAJAKAN  
Lembaga Pendidikan : FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER

Telah mengikuti Praktek Kerja Nyata di PT. PLN (Persero) Cabang Situbondo selama 1 (satu) bulan mulai tanggal 19 Pebruari 2001 s/d 19 Maret 2001.

Demikian keterangan ini kami buat untuk dipergunakan seperlunya.

Situbondo, 13 Maret 2001




**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax. 0331 - 335586 Jember 68121

Email : Fisipunej @ jember, wasantara.net.id

Lampiran 14

Surat Tugas

Nomor : 517 /J25.1.2/PP.9/2001

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember mengaskan nama-nama dibawah ini :

No	N a m a	NIM	Keterangan
01	Nur Arifiyah	98 - 1001	Ketua
02	Evi Yoritasantti	98 - 1026	Wakil ketua
03	Dyah Pramudya	98 - 1072	Anggota
04	Wahyu Novita	98 - 1004	Anggota

Untuk mengikuti Program Magang di PT Perusahaan Listrik Negara Situbondo selama 1 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesai. Selama melaksanakan kegiatan magang diwajibkan mengikuti tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku di tempat Magang.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jember, 1 FEB 2001

Dekan,


Drs. H. MOCH TOERKI

NIP. 130 524 832

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN/PARIWISATA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI / BIMBINGAN LAPORAN AKHIR

Nama Mahasiswa : EVI YORITASANTI  
 Nomor Induk Mahasiswa : 980903101026  
 Alamat Mahasiswa : JL. JAWA VI NO.76 JEMBER  
 Jurusan : ILMU ADMINISTRASI  
 Program Studi : DIPLOMA III PERPAJAKAN  
 Judul Laporan Akhir : PELAKSANAAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN  
 PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP DEWPT. PLN  
 (PERSERO) DISTRIBUSI JATIM CABANG SITUBONDO.  
 Dosen Pembimbing : Drs. TOTOK SUPRIYANTO  
 Asisten Pembimbing :

No	Hari/Tanggal	Jam	Uraian Kegiatan	Ttd.Pemb/Ass.
1.	29-03-2001	09.00	KONSULTASI JUDUL	<i>[Signature]</i>
2.	10-04-2001	09.00	KONSULTASI BAB I BAB II	<i>[Signature]</i>
3.	12-04-2001	09.00	KONSULTASI BAB III	<i>[Signature]</i>
4.	17-04-2001	09.00	REVISI BAB I, II, III, IV	<i>[Signature]</i>
5.	19-04-2001	09.00	ACC DAN BENDEL	<i>[Signature]</i>
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				

Catatan : 1. Dibawa mahasiswa yang bersangkutan pada setiap konsultasi  
 2. Ditanda tangani oleh Dosen /Ass.Pembimbing Laporan Akhir  
 3. Diserahkan kepada Ketua Jurusan /Pemb. Laporan Akhir setelah konsultasi.



DAFTAR HADIR BULAN : MARET 2001

No	NAMA	TANGGAL																																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1	NUR ARIFIYAH	Bq	Bq																															
2	Evi YORIASANTI	ain	ain																															
3	DAH PRAMUDYA W	Ok	Ok																															
4	Wahyu Novita I	Nov	Nov																															
5																																		
6																																		
7																																		
8																																		
9																																		
10																																		
11																																		
12																																		
13																																		
14																																		
15																																		
16																																		
17																																		
18																																		
19																																		
20																																		
21																																		
22																																		
23																																		
24																																		
25																																		
26																																		
27																																		
28																																		
29																																		
30																																		
31																																		

- KETERANGAN:
- Sakit
  - Kecelakaan
  - Cuti
  - Dengan Ijin Kepala Kesatuan
  - Karena Alasan - alasan syah
  - Mangkir

Situbondo, 16 Maret 2001  
KSIPEG  
  
F. A. ISSAL